

Baca artikel lainnya seperti Ekonomi di Kompas.id dengan memindai QR Code

↳ klik.kompas.id/ekonomi

e-mail: desk.ekonomi@kompas.id

Setahun Pengoperasian Whoosh



Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh melintasi Simpang Susun Cikamri di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/10/2024). Hingga akhir Oktober 2024 Whoosh telah melayani 6 juta penumpang.

IMF: 2025-2029, Ekonomi RI Stagnan 5 Persen

IMF memproyeksikan terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam lima tahun ke depan.

JAKARTA, KOMPAS — Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024-2029 stagnan di kisaran 5 persen per tahun. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan bisa mencapai 8 persen di periode itu.

Dalam laporan bertajuk "World Economic Outlook: Policy Front, Rising Threats" yang dirilis Rabu (23/10/2024), Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di kisaran 5 persen. Proyeksinya berturut-turut adalah 5,0 persen pada 2024 serta 5,1 persen pada 2025 dan 2029. Pada periode sama, defisit transaksi berjalan Indonesia diproyeksi oleh IMF akan melebar. Pada 2023, defisit transaksi berjalan adalah 0,3 persen terhadap PDB. IMF memproyeksikan defisitnya akan melebar menjadi 1 persen pada 2024, 2 persen pada 2025, dan 1,4 persen 2029.

Presahat Klausur Presiden urusan Ekonomi Bambang PS Brodjonegoro menyimpulkan bahwa proyeksi yang dibuat IMF baik yang terkait pertumbuhan ekonomi maupun defisit transaksi berjalan, merupakan realitas yang akan dihadapi jika Indonesia tidak segera melakukan transformasi ekonomi.

"Kalau kondisinya *business as usual*, di mana tidak ada upaya transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas, hampir pasti, prediktor tersebut akan terwujud," ujarnya dalam persitanjangan Kompas, Kamis (24/10).

Ekonomi sekaligus Co-founder Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirna menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi IMF mengalami stagnasi erat kaitannya dengan sejumlah tantangan struktural yang tengah dihadapi perekonomian nasional.

Menurut dia, sedikitnya terdapat tiga tantangan berwujud struktural yang dalam beberapa tahun terakhir menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, kondisi fiskal yang buruk dengan tingkat utang yang tinggi.

Kedua, deindustrialisasi berjalan lambat. Ketiga, efisiensi ekonomi yang buruk ditandai dengan tingginya skor ICOR.

"Tantua peralihan yang masif, ekonomi kita akan tercek-cek. Proyeksi pertumbuhan 5-6,1 persen saya rasa sangat masuk akal dan realistis, walau cenderung konservatif," ujar Wijayanto saat dihubungi

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Transaksi Berjalan



Kompas, Kamis (24/10). Namun, Wijayanto melihat peluang besar Indonesia melampaui proyeksi tersebut. Peluang tumbuh 6 persen masih mungkin di tahun-tahun akhir periode 2024-2029. Namun, hal ini menuntut kerja keras, perencanaan matang dan dukungan dari pemerintah.

"Pernah saya ungkapkan jika kita harga komoditas global stagnan atau turun, premi-insuransi ekspor pun langsung turun. Harga komoditas diperlakukan terus berfluktuasi dalam beberapa tahun mendatang," ujarnya.

Di samping itu, reformasi kebijakan dan regulasi terkait izin berusaha juga memengaruhi iklim usaha.

"Sedikitnya dalam wawancara dengan Kompas, Kepala Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Adhinaraga Wijayanto mengatakan, Bappenas telah merancang 2025-2029. Skenario ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5,9 persen," ujarnya.

Di samping itu, reformasi kebijakan dan regulasi terkait izin berusaha juga memengaruhi iklim usaha.

"Sedikitnya dalam wawancara dengan Kompas, Kepala Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Adhinaraga Wijayanto mengatakan, Bappenas telah merancang 2025-2029. Skenario ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5,9 persen," ujarnya.

Skenario pertama, pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Target ini akan ditempuh secara bertahap selama 2025-2029, yaitu berturut-turut 5,7 persen, 6,4 persen, 7 persen, 7,5 persen, dan 8 persen. Dengan skenario ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9 persen selama periode itu.

Skenario kedua, sesuai rancangan awal IPMPN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 8 persen di tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, 2030.

Dradjal masih meyakini bahwa stimulus Keynesian dapat menjadi satu terobosan yang perlu dilakukan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

"Pernah saya ungkapkan jika kita harga komoditas global stagnan atau turun, premi-insuransi ekspor pun langsung turun. Harga komoditas diperlakukan terus berfluktuasi dalam beberapa tahun mendatang," ujarnya.

Di samping itu, reformasi kebijakan dan regulasi terkait izin berusaha juga memengaruhi iklim usaha.

"Sedikitnya dalam wawancara dengan Kompas, Kepala Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Adhinaraga Wijayanto mengatakan, Bappenas telah merancang 2025-2029. Skenario ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5,9 persen," ujarnya.

Skenario pertama, pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Target ini akan ditempuh secara bertahap selama 2025-2029, yaitu berturut-turut 5,7 persen, 6,4 persen, 7 persen, 7,5 persen, dan 8 persen. Dengan skenario ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9 persen selama periode itu.

Skenario kedua, sesuai rancangan awal IPMPN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 8 persen di tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, 2030.

Skenario ketiga, sesuai rancangan awal IPMPN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 8 persen di tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, 2030.

KEBIJAKAN FISKAL

Sejumlah Indonesians Wanti-wanti Gaya Militer Prabowo dalam Kebijakan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Baru di penghujung hari, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang militeristik sudah kentara terlihat, baik dari ucapan, gestur, maupun perencanaan beberapa kebijakan pembangunan. Strategi kebijakan pembangunan dan ekonomi ala militer yang sentralistik dinilai sudah berhasil, terutama di tengah kapasitas fiskal pemerintah pusat yang sudah sangat sempit.

Salah satu pendekatan militer tersebut tampak dari penyelenggaraan program makan gratis (MBG) bagi anak sekolah tingkat dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan anak balita. Program tersebut mendapat prioritas teratas dan menjadi "pertarungan" Prabowo sampai dalam rapat kabinet perhalus ia meminta menteri yang tidak setuju dengan program MBG untuk keluar dari pemerintahan.

Program MBG direncanakan dikoordinasi di bawah Badan Gizi Nasional yang dipimpin Dandan Hindarasa, dosen IPH (Universitas Padjadjaran) dan lembaga kementerian dan lembaga (O/L/L). Program itu mulai dieksekusi per 2 Januari 2025. Sejak ini, program tersebut dieksekusi oleh pemerintah pusat. Kebutuhan anggaran Rp 71 triliun untuk tahun pertama pelaksanaan pada 2025 dengan sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran untuk implementasi program MBG secara penuh diestimasikan mencapai Rp 400 triliun.

Indonesians yang merupakan anggota Profesi Internasional National University Bliane Lewis menilai, strategi penyelenggaraan kebijakan sentralistik itu akan berhasil di tengah ruang fiskal yang sudah sangat sempit. Meski anggaran di tahun pertama bisa ditekan, MBG adalah program yang bersifat tahan lama (*multiyears*) sehingga di-

nya program tersebut. Namun, ia mengkritik, program makan gratis akan memakan waktu yang lama hingga bisa benar-benar efektif dan menjangkau seluruh target. Di India, program serupa dimulai sejak tahun 2000, tetapi baru pada 2021 semua sekolah di India ikut mendapat porsi makan gratis yang ditargetkan.

"Program ini didesain sangat sentralistik sesuai gaya Prabowo yang cenderung *top-down*. Pemerintah pusat akan membayar untuk semua kebutuhan, demikian pula untuk pengaturan logistiknya. Ini memberi beban yang sangat berat untuk kondisi fiskal," kata Bliane dalam diskusi Global Seminar Series: Indonesia's New Government-Economic Perspectives yang digelar secara daring oleh Australian National University, Kamis (24/10/2024).

Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari India yang juga menjalankan program makan gratis serupa. Di India, program itu hanya memakan anggaran 6 miliar dollar AS per tahun, jauh lebih murah ketimbang program MBG Indonesia yang memakan 12 miliar dollar AS-30 miliar dollar AS per tahun. Salah satu sebab adalah strategi pembiayaan gabungan (*cost-sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah di sana.

"Faktor lain karena India hanya fokus memberi makan anak-anak di pendidikan primer (setara SD-SMP), sementara di Indonesia, Prabowo ingin memberi makan semua anak SD-SMA, ibu hamil, dan anak balita," ujar Bliane.

Di menyoroti, di India, program dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Komposisinya 75-25 persen dengan porsi terbesar ditanggung pusat. Untuk lebih merangsang beban fiskal, pemerintah pusat juga mengundang lembaga swadaya masyarakat untuk ikut men-

naik program tersebut.

Butuh waktu lama

Namun, ia mengkritik, program makan gratis akan memakan waktu yang lama hingga bisa benar-benar efektif dan menjangkau seluruh target. Di India, program serupa dimulai sejak tahun 2000, tetapi baru pada 2021 semua sekolah di India ikut mendapat porsi makan gratis yang ditargetkan.

"Program ini didesain sangat sentralistik sesuai gaya Prabowo yang cenderung *top-down*. Pemerintah pusat akan membayar untuk semua kebutuhan, demikian pula untuk pengaturan logistiknya. Ini memberi beban yang sangat berat untuk kondisi fiskal," kata Bliane dalam diskusi Global Seminar Series: Indonesia's New Government-Economic Perspectives yang digelar secara daring oleh Australian National University, Kamis (24/10/2024).

Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari India yang juga menjalankan program makan gratis serupa. Di India, program itu hanya memakan anggaran 6 miliar dollar AS per tahun, jauh lebih murah ketimbang program MBG Indonesia yang memakan 12 miliar dollar AS-30 miliar dollar AS per tahun.

Salah satu sebab adalah strategi pembiayaan gabungan (*cost-sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah di sana.

"Faktor lain karena India hanya fokus memberi makan anak-anak di pendidikan primer (setara SD-SMP), sementara di Indonesia, Prabowo ingin memberi makan semua anak SD-SMA, ibu hamil, dan anak balita," ujar Bliane.

Di menyoroti, di India, program dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Komposisinya 75-25 persen dengan porsi terbesar ditanggung pusat. Untuk lebih merangsang beban fiskal, pemerintah pusat juga mengundang lembaga swadaya masyarakat untuk ikut men-

INFO CSR

HSBC Indonesia Asah Literasi Keuangan dan Bakat Kewirausahaan Anak Muda

HSBC Indonesia menunjukkan komitmen terhadap masa depan berkelanjutan. Salah satunya melalui berbagai kegiatan filantropi yang berfokus pada pengembangan keterampilan masa depan (*future skills*) generasi muda.

Pada tingkat pelajar, HSBC Indonesia berkolaborasi dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengadakan program literasi keuangan bagi lebih dari 45 ribu siswa di 202 SD dan SMP di 16 kota. Program seperti *JA More than Money* dan *Edutech Anak Cerdas* yang disertai kunjungan ke Kantor cabang HSBC, telah membantu siswa memahami pentingnya pengelolaan keuangan pribadi dan etika berkegiatan masyarakat.

Program ini mengasah kemampuan kewirausahaan lewat HSBC Indonesia Business Case Competition. Pada kedua kegiatan tersebut, HSBC selalu melibatkan relawan yang berasal dari staf unit berprestasi aktif sebagai fasilitator maupun mentor. Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia François de Maricourt mengatakan, "Selbagai bank yang bertitik berat pada masa depan berkelanjutan, HSBC memahani pentingnya memiliki generasi penerus (pemimpin) yang dapat menghadapi tantangan apa pun. Inilah yang kami seor keterampilan masa depan (*future skills*)."

Contoh menarik HSBC Indonesia menunjukkan kemampuan literasi keuangan ini berprestasi aktif dilakukan pada Selasa (13/8/2024). HSBC Indonesia mengundang 40 murid SMP untuk belajar langsung tentang layanan perbankan di Kantor HSBC Indonesia World Trade Center, Sudirman, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari inisiatif *JA More than Money* dari PJI dan HSBC Indonesia yang sudah diselenggarakan sejak Maret 2024. Sebanyak 40 murid dari SMPN 58 Jakarta, SMPN 57 Jakarta, SMPN 259 Jakarta, dan SMP IAS Al Jannah diundang mengeksplorasi pentingnya peran bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Mereka belajar mengenai fungsi, layanan, hingga nilai umum dalam bank.

Senior VP Head of Corporate Sustainability HSBC Indonesia Nani Sutiyoko mengatakan, "Berkolaborasi dengan program literasi keuangan, 'Kita harus melakukan kegiatan agar masyarakat melek dan bijak keuangan. Kami sangat percaya anak-anak harus melek keuangan. Ini sangat penting untuk masa depan mereka. Kerja sama dengan PJI telah memasuki tahun ke-15. Bersama kami yang datang ke sekolah untuk mengajar dengan materi dari PJI. Kali ini, khusus kami mengundang murid SMP datang ke kantor bank,' ujar Nani.

Senada, Chairman of The Executive Board Presiden Junior Indonesia, Setiyo mengatakan, "bersama kakak-kakak relawan



HSBC Indonesia, murid SMP ini diajak melihat langsung operasional bank sehingga mereka dapat memahami ragam pekerjaan di sektor tersebut. "Dukung HSBC Indonesia kepada PJI mulai dari jenjang SD hingga SMA. PJI bergerak di bidang tiga pilar literasi keuangan, kaitan kerja, dan kewirausahaan untuk orang muda," katanya.

Partisipasi tingkat internasional

Sementara upaya HSBC Indonesia mengasah kemampuan kewirausahaan tingkat mahasiswa, salah satunya melalui gelaran HSBC Indonesia Business Case Competition. HSBC Indonesia memanggarkan kompetisi bergengsi ini pada Mei 2024.

Untuk kelima kalinya, agenda ini hasil kolaborasi HSBC Indonesia dan Putra Sampurna Foundation. Penetapan kompetisi ini berpartisipasi pada Grand Final Internasional di Hong Kong, yakni ajang HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition.

Lomba ini dirancang khusus untuk mahasiswa S-1 fakultas bisnis, baik mahasiswa lokal maupun yang berkuliah di universitas yang diundang. Setiap universitas mengiratkan 1 tim terdiri atas 4 mahasiswa dan 1 pelatih. Mereka lalu menghadapi studi kasus dan diuji kemampuannya dalam menganalisis serta merumuskan strategi bisnis.

Sebelum kompetisi nasional berlangsung, peserta diajarkan mengenai serangkaian pra-sacara, termasuk *swell-up* analisis kasus bisnis, pelatihan komunikasi, serta program mentoring yang melibatkan kolaborasi dengan mentor dari HSBC Indonesia.

Kompetisi nasional ini dilahi dengan imbuhan babak. "Dimulai dari babak 1 yang diikuti 18 tim dari berbagai universitas. Dari babak ini, enam tim terpilih untuk maju ke babak 2. Selanjutnya, empat tim pemenang bersaing di Babak Kedua Rosend hingga tersisa tiga tim terbaik yang maju ke babak 3.

Seluruh kasus yang digunakan dalam kompetisi ini bersifat eksklusif dan diproses oleh Asia Case Research Center. Peserta hanya diberi waktu tiga jam untuk mempersiapkan analisis kasus, diikuti presentasi 20 menit di depan dewan juri, dan sesi tanya jawab 15 menit. [J]